

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang – undangan Agraria Indonesia*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1984.
- Amaruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengatur Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
- Erwiningsih, Winahyu, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta, Total Media, 2009.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Badan Penerbit Universitas Trisakti, 2016.
- , *UNDANG – UNDANG POKOK AGRARIA: Sejarah Penyusunan, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1971.
- Ismail, Nurhasan, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Jakarta, 2007.
- Istanto, F. Sugeng, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV Ganda, 2007.
- Latief, Ch.N., *Sejarah Perkeretaapian Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, Angkasa, 1997.
- Lubis, Muhammad Yamin, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Badan Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010.

- Noor, Hendry Julian, *Memahami Kerugian BUMN (Persero) Diskursus Kerugian Keuangan Negara dan Tipikor*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022.
- Nurasa, Akur dan Dian Aries Mujiburohman, *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta, STPN Press, 2020.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ketiga; 1991.
- Rubaie, Ahmad, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang, Setara Press, 2016,.
- Salle, Aminuddin, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, Cetakan Pertama: 2007.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak – Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Benda*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1975.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cetakan Kelima, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2005.
- , *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Waloejo, Herri, *Kebijakan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2011.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah – Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan – Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.

Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 2005 tentang Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengamanan Barang Milik Negara.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, perihal Pengujian Undang – Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, 21 Desember 2004.

JURNAL

Bustomi, Abuyazid, “Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria”, *Jurnal Solusi*, Volume 3, Nomor III (September 2013).

Hardini, Fitri, Ngadino, “Peralihan Hak Atas Tanah dengan Hibah Sebagai Aset Daerah”, *Notarius*, Volume 12 Nomor 2, (2019).

Intansari, Virgia dan Irene Eka Sihombing, “Analisis Grondkaart Milik PT. KAI (Persero) Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah”, *Reformasi Hukum*, Trisakti, Volume 3, Nomor 4, (November 2021).

Kesuma, Derry Angling, “Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya”, *Jurnal Lex Librum*, Vol. III, Nomor 7 (Desember 2016).

Pahlevi, Farida Sekti, “Kekuatan Hukum Groondkart dan Problematikanya di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4, Nomor 1, (Juni 2022).

Ruslina, Elli, “Makna Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, (Maret 2012).

Sadewa, Yunianto Wahyu, Jawade Hafidz, “Peran PPAT dalam Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kota Semarang”, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 2, (Juni 2017).

Santoso, Urip, “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24 Nomor 2, (Juni 2012).

WEBSITE

Irsyan Hasyim, 2017, Tempo.com, *PT. KAI dan Ditjen Perkeretaapian Berebut Lahan di Stasiun Depok*, <https://bisnis.tempo.co/read/1040714/pt-kai-dan-ditjen-perkeretapi-an-berebut-lahan-di-stasiun-depok>, diakses pada 05 Maret 2024 pukul 14.00.

Kanal Pengetahuan FH UGM, *Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Barang atau Aset Tanah Milik Negara atau Daerah*, <https://www.youtube.com/watch?v=AZ9BqPmk9NM&t=8141s>, diakses pada 27 Maret 2024 pukul 19.30.

Letezia Tobing, 2013, *Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak-cl4712/>, diakses pada 28 Maret pukul 10.20.

Putri Ayu Trisnawati, *Jenis – Jenis Peralihan Hak Atas Tanah*, dalam <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/>, diakses pada 15 Februari 2024 pukul 09.30.

TESIS

Cahyawati, *Tinjauan Implementasi Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Terhadap Penggunaan Tanah Dan Atau Bangunan Milik Dinas Polres Gunungkidul Oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Gunungkidul*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Yustikaningsih, Anisa, *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Hak Pengelolaan Sebagai Barang Milik Negara/Daerah Melalui Perjanjian Sewa*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.